

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abd. Rahman, Baso Madiung, Politik Hukum Pertanahan – Suatu Kajian Historis dan Yuridis, Bosowa, Jakarta, 2016.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Agus Budianto, Metodologi ‘*Research of Law*’, Diktat Kuliah Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2021.
- A.F. Elly Erawati, J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, Inggris-Indonesia, Proyek ELLIPS, Jakarta, 1996.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Chidir Ali, Badan Hukum, cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2005.
- Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2006.
- Gunanegara, Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2017.
- Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli, dan Pembebasan Tanah, Sejarah Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2016.
- Gunanegara, Intelijen Pertanahan, Deteksi Dini Kerugian Negara, Dialektika Politik Hukum Agraria, Tatanusa, Jakarta, 2017.
- Gunanegara, Pendapat Hukum, Bangunan, Fungsi, dan Penerapan & Contoh Pendapat Hakim pada Tindak Pidana Agraria, Tatanusa, Jakarta, 2019.

- Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cetakan 1, Rinek Cipta, Jakarta, 2003.
- Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM, Malang, 2002.
- Philipus M. Hadjon, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi cetakan ke-12, Kencana, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sri Winarsi, *et. al.*, *Seri Hukum agrarian: Prinsip Prioritas Dalam Hukum Agraria Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021.
- Sri Mamuji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2006.
- Sri Mamuji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan I, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Wasino, *et. al.*, *Sejarah Nasionalisasi Asset-Asset BUMN, Dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional*, Biro Hukum Kementerian BUMN Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Wolfgang Gaston Friedmann, *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, Steven & Son, 1971.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960, tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, tentang Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960, tentang Nasionalisasi Perusahaan N.V. K.P.M. di Indonesia dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan N.V. K.P.M. (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) di Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979, tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 28/PRT/M/2015.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2016.

Keputusan Perdana Menteri Nomor 12/PM/KB/1958, tanggal 4 Maret 1958 dan Nomor 13/PM/KB/1958, tanggal 20 Maret 1958 mengenai N.V. "*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*" (K.P.M.).

Panitia Penguasa N.V. *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* yang dibentuk dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 12/PM/KB/1958 tertanggal 2 Maret 1958 dinyatakan bubar dan segala sesuatunya yang bertalian dengan pekerjaan Panitia tersebut diserahkan kepada Menteri Perhubungan.

Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor Th. 8/1/9 Tanggal 20 April 1962.

3. Jurnal

Dian Aries Mujiburohman, "Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak yang Telah Berakhir", *Jurnal Bhumi* .2 (2), November 2016.

Nurhasan Ismail, "*Rechtsverwerking* dan Pengadopsiannya dalam Hukum Tanah Nasional," *Jurnal Mimbar Hukum* 19 (2), Juni 2007, hal. 189.

4. Website

Cambridge Dictionary, s.v. “Research,” diakses tanggal 12 Oktober 2021,
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/research>.

The Law Dictionary, s.v. “Priority,” diakses dari
<http://thelawdictionary.org/priority/>, pada tanggal 25 Oktober 2021.

